

Evaluasi Kebijakan Pendidikan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar

Diki Somantri¹, Dina Amaria Sembiring², Isfi Aulia Septiani³

^{1,2,3} UPI Kampus Daerah Cibiru, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: dikis@upi.edu¹, dinaamaria9@upi.edu², isfiaul12@upi.edu³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar (SD). Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya guna meningkatkan sarana dan prasarana di SD. kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) Studi literatur. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana di SD. Temuan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan, dengan fokus pada alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung perkembangan pendidikan dasar yang berkualitas.

Kata kunci: *Evaluasi, Sarana, Prasarana*

Abstract

This research aims to evaluate the impact of education policy on the development of facilities and infrastructure in elementary schools (SD). In an effort to improve the quality of education at the primary level, the government has implemented various policies to allocate resources to improve facilities and infrastructure in elementary schools. qualitative with descriptive analysis techniques with library research. Literature study. This research provides a better understanding of the relationship between education policy and the development of facilities and infrastructure in elementary schools. These findings can be a basis for improving education policy in the future, with a focus on more effective and efficient resource allocation to support the development of quality basic education.

Keywords : *Evaluation, Facilities, Infrastructure*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas, evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah krusial. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah dampak kebijakan

pendidikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar (SD). Sarana dan prasarana yang memadai di SD adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di sekolah dasar berkualitas dan memadai. Evaluasi kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa investasi dan kebijakan pendidikan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas evaluasi kebijakan pendidikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di sekolah dasar.

Sumber daya fisik, seperti gedung sekolah, fasilitas belajar, dan peralatan, memiliki peran yang krusial dalam mendukung kualitas pendidikan. Johnson, R. (2018) Investasi yang memadai dalam sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan motivasi siswa, kualitas pengajaran, dan hasil belajar. Oleh karena itu, penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan telah berdampak pada pemenuhan kebutuhan ini.

UNESCO. (2017) Evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program pendidikan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi anggaran, pelaksanaan program, dampaknya terhadap sarana dan prasarana sekolah, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran.

Jones, A. B. (2019), Evaluasi kebijakan pendidikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di SD bukan hanya sebatas perhitungan anggaran atau jumlah bangunan fisik. Hal ini juga mencakup aspek-aspek kualitas, aksesibilitas, keberlanjutan, dan keberfungsian sarana dan prasarana tersebut. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa isu penting yang perlu dievaluasi, seperti:

Smith, J. (2018), Evaluasi kebijakan pendidikan terhadap pembangunan sarana dan prasarana di SD merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui evaluasi yang cermat, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan generasi penerus bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan yang berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sejauh mana kebijakan pendidikan berkontribusi pada pembangunan sarana dan prasarana di tingkat sekolah dasar, dan bagaimana pengembangan ini dapat ditingkatkan dalam konteks pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (*library research*) Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999) dimana penelitian ini berusaha menganalisis dengan cara membandingkan kesimpulan setiap literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses ataupun tindakan yang tujuan untuk menentukan nilai dari suatu hal dalam dunia pendidikan atau yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan dan pembelajaran, dengan kata lain seorang guru jika melakukan suatu evaluasi yang tepat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi pendidikan bisa diartikan tentang kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Menurut Calongesi (1995) Evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran, Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002). Cronbach (Harris, 1985) menyatakan bahwa evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program. Sementara itu menurut Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatur keberhasilan program pendidikan. Tayibnapis (2000) dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauh mana sejauh tujuan pendidikan dapat dicapai.

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta dapat memberikan dampak nyata terhadap sesuatu yang diinginkan. Pada umumnya, evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses atau kegiatan dilakukan secara berurutan dan menjadi tahapan akhir dalam proses analisis kebijakan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan perlu dilakukan dengan mengajukan berbagai alasan yang rasional. sebagai berikut apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijaksanaan pendidikan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Apakah rumusan kebijakan pendidikan telah dilaksanakan sudah berhasil atau belum.

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi internal dan eksternal. Adapun dimensi internal yaitu menyangkut pihak-pihak terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi kebijakan. Mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan agar diperoleh informasi yang objektif, Apakah kebijakan sukses atau sebaliknya. Mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak. Menghindari pengulangan kesalahan. Yang bersifat eksternal

terkait dengan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan maupun informasi kebijakan namun mereka dapat menikmati manfaat revolusi kebijakan itu antara untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik dimana penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban.

Pengertian Sarana & Prasarana di Sekolah Dasar

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2), sarana pendidikan adalah “semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah”. Wahyuningrum (2004: 5), berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai”. Jadi dapat disimpulkan Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Suatu penunjang proses merupakan prasarana. Suatu alat yang mendukung pembelajaran saat proses adalah sarana guna untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi lancar dalam pembelajaran (Setyaningih, 2018). Sarana yaitu perlengkapan untuk capai tujuan. Prasarana adalah perangkat dalam proses pembelaran dengan lancar dan tepat (Zafar, 2019). Perlunya sarana & prasarana di sekolah yaitu sesuatu untuk di kembangkan pada pendidikan. Karena sangat penting untuk berjalan lancarnya proses pembelajaran. Agar sekolah tersebut menjadi bermakna dalam pembelajaran. Proses pengembangan sarana & prasarana di sekolah harus ada manajemen. Dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan sarpras di satuan pendidikan diperlukan proses manajemen, yaitu rancangan atau perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan (Indrawan, 2015). Semua perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran yang tidak berjalan dan berjalan agar mencapai pembelajaran yang baik yang dinamakan sarana dan perlengkapan yang sebagai pendukung pembelajaran seperti lahan, dan jalan sekolah (Novita, 2017).

Bentuk sarana yaitu ada 3 (Novita, 2017):

1. Alat yang lambat habis dan cepat habis Sarana tersebut bisa habis digunakan dan tidak habis digunakan.
 - a. Alat yang habis secara cepat yaitu seperti kapur putih, spidol dan bahan kimia. Alat yang bisa berubah yaitu kayu, besi, dan karton. Alat yang harus diperlukan pada pembelajaran seperti laptop, lampu, dan buku.
 - b. Alat yang habisnya dalam waktu lambat seperti kursi, meja, peta dan beberapa perlengkapan dilapangan.
2. Bergerak tidaknya pada saat digunakan;

- a. Alat yang bisa digerakkan seperti lemari, dan kursi serta meja.
 - b. Alat yang tidak bisa digerakkan seperti listrik dan air. Hubungannya dengan proses belajar mengajar. Seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan sarana pengajaran.
3. Media pengajaran yaitu membantu mengajar pembelajaran Ada 3 bentuk sarana, yaitu sarana suara, sarana gambar, dan sarana suara dan gambar.

Dan ada jenis prasarana di sekolah seperti:

- a. Ada prasarana dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran yaitu tempat teori, tempat pustakaan, tempat praktek ketrampilan, dan laboratorium.
- b. Ada prasarana yang tempatnya bukan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran namun sebagai pembantu pembelajaran seperti tempat kepek, ruang makan/kantin, akses tanahdanjalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan parkir. Sekolah minimal memiliki prasaranaa sebagai berikut: tempat belajar, tempat pustaka, tempat labor, tempat kepala sekolah, tempat majelis guru, tempat TU, ruang sholat, tempat BK, tempat kesehatan, wc, tempat penyimpanan, tempat udara, ruang olahraga (Novita, 2017). Dari yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk sarana dan prasarana seperti alat tulis, tempat, bangunan, tempat membaca buku, tempat belajar, tempat rapat, tempat TU, labor, kantin dan lain-lain. Mutu dan kualitas sekolah juga di dasari oleh fasilitas dan kelengkapan sekolah baik untuk dalam kelas maupun luar kelas.

Tujuan sarana & prasarana yaitu (Parid, 2020)

- a. Supaya dapat penyediaan fasilitas dan alat dengan cara persiapan dan penyediaan yang tersusun,
- b. Mengupayakan pengaplikasian fasilitas dan alat sekolah dengan efektif,
- c. Supaya membantu tanggungan siap operasi fasilitas untuk membantu mulusnya kerja dengan demikian dapat akhir yang bagus,
- d. Supaya mengupayakan pelestarian fasilitas dan alat dengan demikian bantu dalam keadaan bisa digunakan dikala diperlukan untuk orang di pendidikan.

Tujuan lain dari (Ellong, 2007) yaitu untuk memperindah ruangan, tempat dan segala yang bergerak dan tidak bergerak agar tujuan pembelajaran menjadi sangat tepat dan prosesnya menjadi nyaman dan efisien buat belajar di kelas dan dipandang orang. Jadi sarana dan prasarana di setiap sekolah sangat penting supaya berjalannya pembelajaran yang sangat bermakna dan setiap peserta didik merasa sangat nyaman satuan pendidikan tersebut. Serta hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kelengkapan sarpras pada sekolah tersebut, serta sistem belajar pun juga menjadi unik dan menyenangkan jika sarana tersebut lengkap.

Kebijakan Pemerintah

Dalam Permendiknas No. 24/2007 dijelaskan mengenai standar sarana dan prasarana yang meliputi; sarana dan prasarana untuk ditingkat sekolah dasar; sekolah menengah dan tingkat sekolah menengah atas. Perbedaan standar tersebut dilihat dari beberapa segi; pertama satuan Pendidikan, kedua gedung bangunan yang digunakan, ketigis ketersediaan infrastruktur serta fasilitas yang lengkap dan memadai, keempat ukuran lahan yang menunjang Pendidikan (Fathurrochman et al., 2021). Dilihat dari jenjang pendidikan baik itu

dari mulai SD, SMP, dan SMA tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sarana dan prasarana. Akan tetapi yang menjadi pembeda ialah dalam segi kuantitas dan luasnya. Dimana jika tingkat pendidikan itu semakin tinggi, maka sarana dan prasarana yang harus disediakan di sekolah juga semakin banyak dan lahan yang mendukung juga semakin luas. Gedung sekolah merupakan fasilitas pokok yang menunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar (Annisa et al., 2016). Pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi anak sekolah harus dilakukan oleh pemerintah agar peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minat serta potensi yang ada dalam dirinya. Kenyamanan siswa dalam belajar tidak hanya dilihat dari bagaimana cara seorang guru menyampaikan pelajaran. Faktor eksternal lainnya ialah mengenai sarana dan prasarana salah satunya kondisi bangunan sekolah yang mampu menjadi penunjang semangat siswa dalam belajar.

Masalah Yang Terjadi

Data Kemendikbudristek terakhir menyebutkan ruang kelas yang rusak di sekolah negeri Indonesia bertambah menjadi 250.000 unit atau sekitar 26% dalam satu tahun terakhir (Sianipar & Maulia, 2023). Dari data yang dijelaskan kerusakan bangunan sekolah di Indonesia tergolong tinggi, maka perlu adanya kebijakan baru untuk mengurangi permasalahan tersebut. Pendidikan di Indonesia saat ini masih terbelah belum merata terutama dalam sarana dan prasarana (Susiani et al., 2022). Permasalahan yang terjadi bukan hanya mengenai kurangnya tenaga pendidik akan tetapi mengenai sarana dan prasarana terutama masih banyak sekolah-sekolah yang bahkan membutuhkan perbaikan ruang kelas.

Peristiwa mengenai ambruknya ruang kelas sering kita dengar atau bahkan kita melihatnya lewat televisi ataupun media masa lainnya (Bianti & Khusnah, 2012). Ada yang ambruk disebabkan oleh bangunan yang sudah usang serta sudah lama belum mendapatkan perbaikan, ada juga yang disebabkan oleh bencana alam. Kerusakan ruang kelas sering dialami oleh sekolah-sekolah yang berada dipelosok desa, baik itu ruang kelas yang memiliki kerusakan yang ringan sampai kerusakan parah.

Solusi

Pemerataan serta perluasan akses pendidikan menjadi faktor utama dalam upaya memperluas kesempatan sama bagi semua siswa dari berbagai golongan yang berbeda, baik secara ekonomi, sosial, lokasi tempat tinggal, serta kemampuan intelektual (Wardhana & Pontan, 2022). Dengan banyaknya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia maka pemerintah harus mampu menanggapi berbagai masalah dengan berbagai solusi, agar pendidikan nasional mampu diwujudkan dengan baik. Salah satu cara pemerintah peduli terhadap perbaikan pendidikan ialah dengan cara peningkatan sarana dan prasarana gedung sekolah.

Keterlibatan pemerintah dalam bidang pendidikan perlu dilakukan pertimbangan yang adil antara pembangunan fisik dan non fisik (Bustari, 2016). Kondisi Pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) butuh perhatian khusus. Masih banyak pemerintah daerah yang kurang memperhatikan sekolah yang memang membutuhkan Pembangunan infrastruktur. Pada dasarnya biaya Pendidikan sudah dianggarkan sebesar 20% APBN yang dimana untuk dialokasikan ke daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) serta alokasi umum (DAU) dari

jumlah anggaran yang dialokasikan sangat besar, maka sudah seharusnya pendidikan di Indonesia merata sampai ke pelosok daerah (Masjhur & Karnati, 2022).

Pemerintah menyalurkan dana BOS kepada setiap sekolah yang dimana diperuntukkan untuk pendanaan pendidikan (Muttaqin, 2023). Dari anggaran dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah maka sekolah yang menerimanya wajib mengelola keuangan sebaik mungkin baik dipergunaan untuk perawatan gedung ataupun kebutuhan yang lainnya. Karena jika setiap sekolah mampu memanfaatkan dana BOS untuk perawatan rutin bangunan sekolah maka cara menggolongkan tuturan tersebut berdasarkan indikator jenis tindak tutur ekspresif.

SIMPULAN

Pendidikan akan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menanggapi perubahan. Ketika pendidikan menjadi poros utama perubahan, perubahan dapat dikelola dengan baik dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai. Pada awal era globalisasi, sektor pendidikan Indonesia terus mengalami perkembangan. Gedung sekolah merupakan fasilitas yang lengkap untuk memperlancar proses belajar mengajar. Upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Dari ilustrasi yang dibuat penulis dan berbagai informasi yang diperoleh, pertama-tama masih banyak sekolah yang memerlukan renovasi, namun cukup banyak pula yang telah merenovasi gedung sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S & Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi.
- Asha, L. (2013). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional Sekolah Dasar Negeri 2 Centre Curup Kota*.
<http://repository.iaincurup.ac.id/67/>
- Asrida, W., & Rastra, T. (2016). *Evaluasi Proses Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Pasca Lima Tahun Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Calongesi, J.S. 1995. *Merancang Tes Untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung: ITB.
- Ellong, T. D. A. (2007). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pendidikan Islam*. *Pendidikan Islam Iqra'*, 11(1), 1–8.
- Fathurrochman, I., Siswanto, S., Anggraeni, R., & Kumar, K. S. (2021). *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Menunjang Mutu Pembelajaran di SDN Lubuk Tua Kabupaten Musi Rawas*. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 65–75.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1288>
- Firdausi, M., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). *Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan dasar terkait Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 158–163.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.119>
- Haris, B.M. (1985). *Supervisory Behavior in Education*. New Jersey: Prentice Hall.

- Huda, N, M. 2018. Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6 (2), 51-69. <https://www.e-jurnal.stail.ac.id/index.php/tadibi/article/view/9/9>
- Indrawan, I. (2015). *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Deepublish.
- Johnson, R. (2018). *Education Policy and Evaluation*. Sage Publications.
- Jones, A. B. (2019). Assessing the Impact of School Infrastructure on Student Learning Outcomes. *International Journal of Educational Evaluation*, 15(3), 112-125.
- Kumano, Y. 2001. *Authentic Assessment And Portfolio Assessment-Its Theory And Practice* Japan : Shizuoka University.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novita, M. (2017). Sarana Dan Prasarana Yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Volume 4,(2), 127. <http://ejournal.staiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/64714>.
- Parid, M. & A. L. S. A. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, 11(2), 266–275.
- Setyaningih, S. (2018). Pengelolaan sarana prasarana dalam implementasi kurikulum pendidikan guru sekolah dasar: Sebuah studi kasus di Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 62– 71. <https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6397>.
- Smith, J. (2018). Evaluating Education Policy for Infrastructure Development in Primary Schools. *Journal of Educational Policy and Planning*, 20(2), 45-58.
- Tayibnaps, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta. Tersedia: from <https://en.unesco.org/themes/education-policy-analysis>. Diakses pada 29 Oktober 2023.
- Tjahyani, B. (2011). EVALUASI PEMENUHAN STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA BANDUNG membangun manusia Indonesia seutuhnya , yang berfungsi sebagai subyek yang. *Invotec*, VII(1), 81–91.
- Warni Tune Sumar. Dkk. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : CV Cendekia Press.
- Zafar, M. A. & H. A. (2019). Administrasi Sarana dan Prasarana. *Jurnal Administrasi Sarana Dan Prasarana*, 1, 4.
- Zainul & Nasution. (2001). *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti.